



2024

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) 2024

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : info@pn-makassar.go.id



Website : www.pn-makassar.go.id

Makassar - 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya, kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 serta Rincian Awal Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar dokumen ini dimana setiap detail kegiatan yang telah diimplementasikan dapat dilaporkan.

Demikian Rencana Aksi Kerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2024 ini dibuat semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal'alam.

Makassar, 16 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Makassar



Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Maksud dan Tujuan	1
BAB II RENCANA AKSI KINERJA.....	2
RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2024	5
BAB III PENUTUP.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang berlokasi di Jl. R.A.Kartini No 18/23 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di Linekungan Peradilan Umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Makassar, bertugas danberwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan wilayah hukum Kota Makassar sesuai asas peradilan : sederhana, cepat dan biaya ringan.

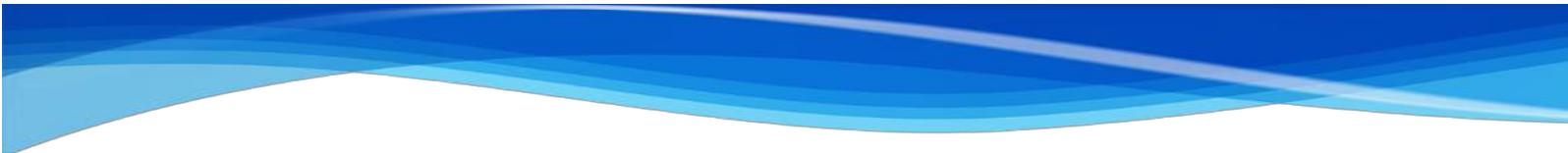
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan sari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini memiliki maksud dan tujuan sebagaiberikut :

1. Sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024
2. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



BAB II
RENCANA AKSI KINERJA

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah menetapkan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024 dalam matriks sebagai berikut :

RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	30%	60%	90%	92%
		d. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	2%	4%	5%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	30%	75%	80%	90%
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	30%	75%	80%	90%
		g. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	30%	50%	65%	75%
		h. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (indeks 3,6)	90% (indeks 3,6)	90% (indeks 3,6)	90% (indeks 3,6)

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		1	2	3	4				
1.	Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	Terlaksananya Percepatan Penyelesaian Perkara sebagai dukungan Penyelesaian Perkara yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Hakim Tipikor	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	126.840.000

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (TRIWULAN)			
			I	II	III	I V
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	30%	55%	75%	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	55%	75%	5%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan	√	√	√	√	Terjaminnya perkara pidana yang diselesaikan mulai dari proses pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di sidang Pengadilan, Minutasi dan Upaya Hukum, Pengiriman petikan/Salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, penanganan perkara banding, kasasi dan PK	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	264.000.000

2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan	√	√	√	√	Terjaminnya perkara pidana korupsi yang diselesaikan mulai dari proses pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di sidang Pengadilan, minutasasi dan upaya hukum, pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa, pengiriman surat penahanan, dan perpanjangan penahanan, penanganan perkara banding, kasasi, dan PK.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	422.451.000
3.	Perkara PHI (Dibawah 150 Juta) Yang Diselesaikan	√	√	√	√	Terjaminnya proses pendaftaran sehingga akan mendukung proses pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di sidang Pengadilan, Minutasasi dan Upaya Hukum, Pengiriman petikan/Salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	35.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1.	Melakukan Layanan Jasa Konsultan Bantuan Hukum	√	√	√	√	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	72.000.000
2.	Penanganan Perkara Prodeo	√	√	√	√	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2.010.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	55%	65%	75%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Melakukan eksekusi putusan pengadilan	√	√	√	√	Terlaksananya eksekusi putusan pengadilan untuk Perkara PHI (dibawah 150 juta)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	7.005.000
		√	√	√	√	Biaya eksekusi untuk Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.200.000

RENCANA AKSI KINERJA TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
5.	Pelaksanaan Dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan	a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Non Operasional Kantor				
		- DIPA 01	25%	50%	75%	99%
		- DIPA 03	25%	50%	75%	95%
		c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Pengelolaan Belanja Pegawai	√	√	√	√	Terlaksananya Pengelolaan Belanja Pegawai yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	26.911.516.000
2	Pengelolaan Belanja Operasional Kantor : Belanja Keperluan Perkantoran	√	√	√	√	Terlaksananya Belanja keperluan kantor yaitu Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim, Tambahan Seragam CPNS, Pakaian Satpam, Pakaian Pengemudi dan Pramubakti	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	1.336.424.000
3	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	1.523.084.000
4	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran untuk Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran lebih dari 40 Pegawai	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	186.660.000

5	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Langganan internet dan Lisensi Video Conference	√				Terlaksananya pembayaran Belanja Langganan Internet dan Lisensi Video Conference	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	219.000.000
6	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	20.400.000
7	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Langganan Telepon	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Langganan Telepon	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	54.000.000
8	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Langganan Air/Gas	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Langganan Air/Gas	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	3.000.000
9	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Langganan Web Hosting dan Domain	√				Terlaksananya Pembayaran Belanja Langganan Web Hosting dan Domain	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	2.300.000

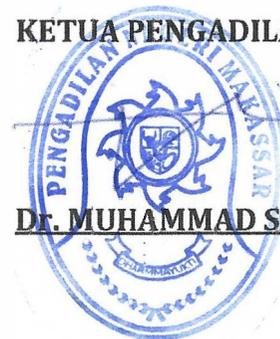
10	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	√	√	√	√	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung I Kantor Lama, Gedung II Kantor 4 Lt, Gedung Tipikor dan Halaman	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	1.195.173.000
11	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	65.800.000
12	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin meliputi Kendaraan roda 4, kendaraan sewa roda 4 (BBM), kendaraan roda 2, Laptop, Komputer, Server, Printer, AC Split, Faximilie, Inventaris Kantor, Mesin Fotocopy/Toner, Mesin genset, Lift, Perangkat jaringan Wifi/Accesspint/Router/ Hub, Perangkat Soundsistem, Bahan Bakar Genset, serta pemeliharaan CCTV	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	152.326.000

13	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Keperluan Perkantoran	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran, yaitu : Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim, pakaian Satpam, Pakaian Pengemudi dan Pramubakti	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	73.000.000
14	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Honor Operasional Satuan Kerja meliputi Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Pengelola PNB	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	58.992.000
15	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim dan Hakim Adhoc	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim dan Hakim Adhoc	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	486.000.000
16	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Belanja Barang Operasional lainnya Rapat Koordinasi Internal	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Barang Operasional lainnya meliputi Kudapan (snack) dan Bahan/Spanduk/Dokumen tasi	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	77.140.000

17	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor – Kegiatan Koordinasi ke Pusat : Belanja Perjalanan Dinas Biasa	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	75.460.000
18	Pengelolaan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor – Kegiatan Konsultasi ke tingkat Banding/KPPN/KANWIL/KPKNL: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	√	√	√	√	Terlaksananya Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	12.000.000

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 16 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H.,M.Hum.

BAB III PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024 yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja suatu organisasi harus memenuhi kriteria antara lain spesifik dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan dapat diukur. Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024 sebagai bahan dalam tolak ukur dan evaluasi Kinerja demi mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung.